

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN 2018 – 2023



KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumedang. Seiring dengan telah ditetapkannya Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Perubahan Cascading DPMPTSP, maka DPMPTSP Kabupaten Sumedang perlu menyelaraskan dokumen lima tahunan SKPD yaitu Renstra yang ditujukan untuk konsistensi pencapaian indikator kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra DPMPTSP Kabupaten Sumedang ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program yang terdapat dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP, sehingga Perubahan Renstra ini menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran DPMPTSP Kabupaten Sumedang untuk tahun-tahun yang akan datang

Akhirnya, semoga Perubahan Renstra ini dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang.

Sumedang, 29 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMEDANG



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN		
1.1	Latar Belakang.....	5
1.2	Landasan Hukum.....	7
1.3	Maksud dan Tujuan.....	9
1.4	Sistematika Penulisan.....	9
1.5	Keterkaitan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan RPJMD	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DAERAH		
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2.1.1	Tugas.....	13
2.1.2	Fungsi.....	13
2.1.3	Struktur Organisasi.....	14
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah.....	16
2.2.1	Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur.....	16
2.2.2	Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	17
2.2.3	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	17
2.2.4	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan.....	18
2.2.5	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	20
2.2.6	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan.....	21
2.2.7	Sarana dan Prasarana.....	21
2.3	Kinerja Pelayanan.....	22
2.4	Tantangan dan Peluang.....	23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH		
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	28
3.2	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	29
3.2.1	Visi	29
3.2.2	Misi	30
3.3	Telaahan Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	31
3.4	Penentuan Isu-Isu Strategis.....	32
BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN		
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	37
4.2	Indikator Kinerja Utama	39
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		
5.1	Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan PTSP.....	40
5.2.1	Strategi.....	41
5.2.2	Arah Kebijakan.....	41
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN		
6.1	Rencana Program dan Kegiatan.....	43



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.....	72
--	----

BAB VIII PENUTUP

Penutup.....	74
--------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur.....	16
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	17
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	18
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan.....	18
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	21
Tabel 2.6	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan.....	21
Tabel 2.7	Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis Pada Tahun 2021.....	22
Tabel 2.8	Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Sumedang...	23
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.....	29
Tabel 3.2	Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Periode 2019 2023.....	31
Tabel 3.3	Perbandingan Sasaran Renstra Kementerian Terkait serta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Sumedang.....	32
Tabel 3.4	Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang.....	35
Tabel 4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal Dan PTSP.....	38
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama.....	39
Tabel 5.1	Analisa Swot Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal.....	41
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan.....	42
Tabel 6.1a	Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah.....	44
Tabel 7.1	Indikator Bidang Urusan Penanaman Modal Dan PTSP.....	72
Tabel 7.2	Target Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Renstra.....	7
Gambar 1.2	Keterkaitan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	12
Gambar 2.1	Struktur Organisasi.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, dan ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang merupakan unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Bidang Penanaman Modal yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan dan



perundang-undangan yang berlaku.

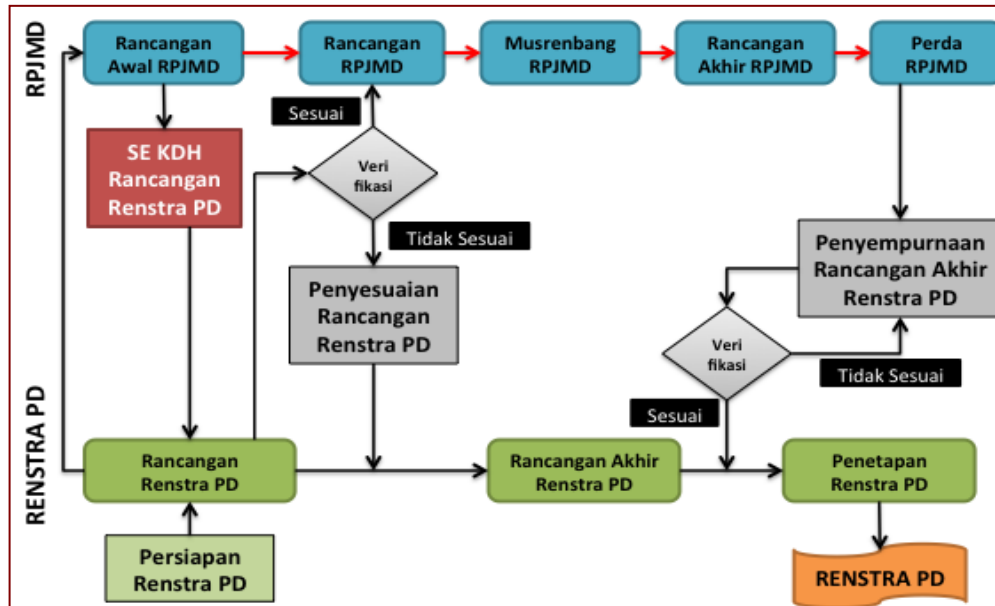
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Perubahan Cascading DPMPTSP, maka DPMPTSP Kabupaten Sumedang perlu menyelaraskan dokumen lima tahunan SKPD yaitu Renstra yang ditujukan untuk konsistensi pencapaian indikator kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Selanjutnya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan. Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang secara rinci dijabarkan dalam Lampiran peraturan tersebut. Proses penyusunan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
2. Penyusunan rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
4. Penetapan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP sampai dengan penetapan Renstra OPD dapat dilihat pada Gambar 1.1, sebagai berikut :





Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang Periode 2019-2023

Dengan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Periode 2018-2023 maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap OPD, sehingga Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
- 

Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan fungsinya.


1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang;
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- 

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Dinas Penanaman Modal dan PTSP; kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- 2.2. Sumber daya Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bab ini terdapat 5 (lima) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP; telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; telaahan renstra Kementerian/Lembaga; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS (JIKA ADA)
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan PTSP.



Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP selama 5 (lima) tahun mendatang.

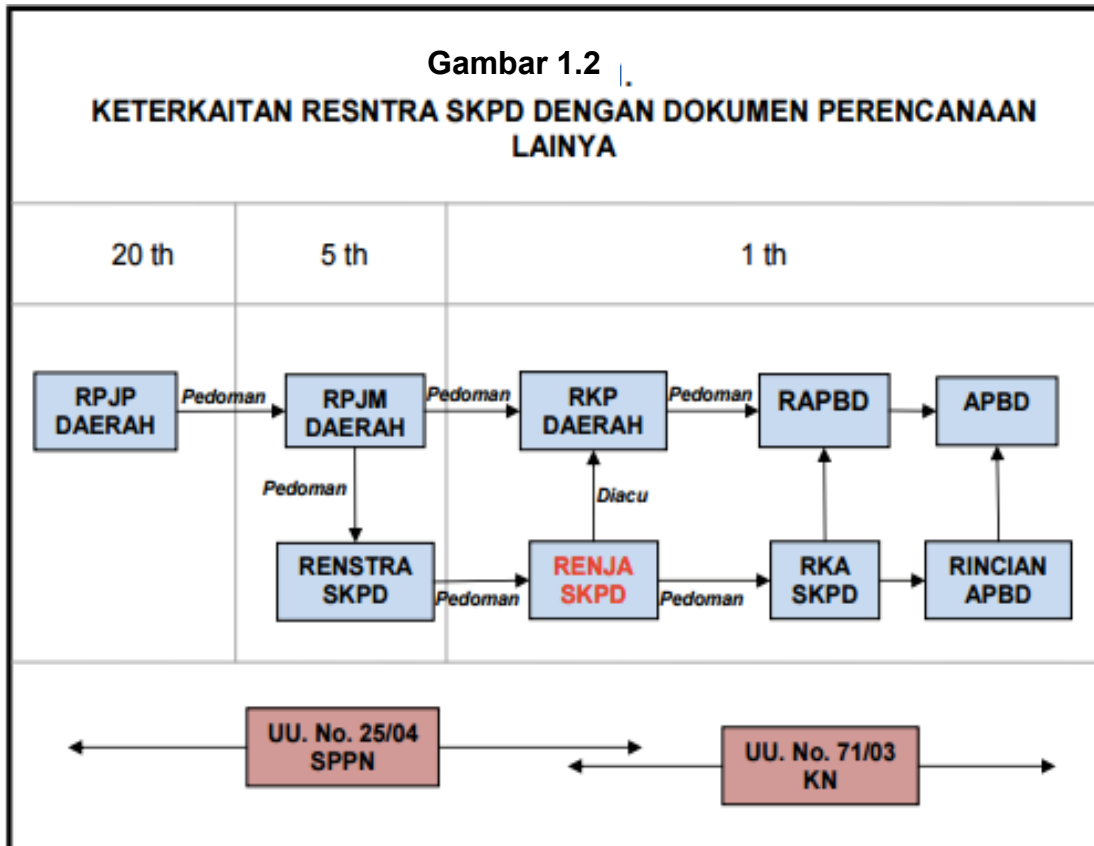
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup**Lampiran-Lampiran**

1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Sesuai gambar di atas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta anggaran tahunan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam dokumen Renja dan RKA.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN SUMEDANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang


Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

2.1.1. Tugas

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian Dinas;
 - b. menetapkan kebijakan perencanaan umum, perencanaan strategis, dan peraturan perundang-undangan penanaman modal daerah;
 - c. menetapkan kebijakan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal, pembuatan peta potensi investasi yang menjadi kewenangan daerah;
 - d. menetapkan kebijakan pengembangan peluang dan potensi penanaman modal daerah;
 - e. menetapkan kebijakan identifikasi potensi sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar;
- 

- f. menetapkan kebijakan pembinaan penanaman modal melalui peningkatan kemitraan, daya saing yang adil dan penyebaran informasi penanaman modal;
- g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penanaman modal daerah;
- h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan, perencanaan, pengembangan promosi, kerjasama, iklim investasi dan pengendalian penanaman modal;
- i. melaksanakan fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal;
- j. melaksanakan koordinasi penanaman modal dalam daerah yang menjalankan kegiatan penanaman modal di luar daerah;
- k. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
- l. menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah;
- m. menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya

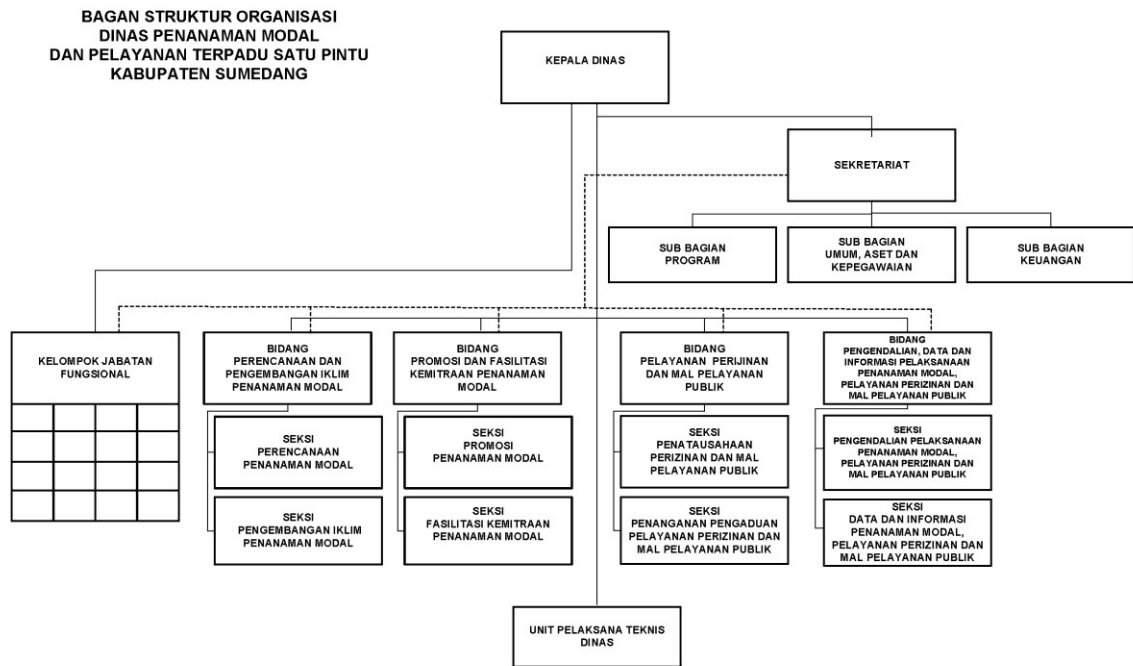
2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- d. Kepala Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal;
- e. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik;
- f. Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik; dan
- g. Jabatan Fungsional.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Nomo 19 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, untuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagaimana Gambar 2.1.





Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Sumedang

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sampai dengan pertengahan tahun 2021, jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang dan jajarannya sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang dengan profil demografi sebagai berikut :

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP paling banyak berada di kelompok umur diatas 50 tahun yaitu sebanyak 20 orang. Sedangkan kelompok umur 46-50 tahun sebanyak 5 orang dan kelompok umur 41-45 sebanyak 7 orang, kemudian kelompok umur 36-40 sebanyak 6 orang dan kelompok umur 31-35 sebanyak 1 orang. Hal yang menjadi perhatian untuk kondisi tersebut adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP perlu mempersiapkan pegawai baru karena dalam 5 (lima) tahun mendatang terdapat 9 orang yang akan memasuki masa pensiun.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20 s/d 25	26 s/d 30	31 s/d 35	36 s/d 40	41 s/d 45	46 s/d 50	>50	
1	Sekretariat				1	2	1	7	11
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal					1	1	5	7
3	Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal			1	1		1	3	6
4	Bidang Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik				4	3		3	10
5	Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik					1	2	2	5
TOTAL				1	6	7	5	20	39

2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 pegawai yang menempati golongan IV sebanyak 7 orang, pegawai yang menempati golongan III sebanyak 26 orang, pegawai yang menempati golongan II sebanyak 6 orang.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Menurut Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat		1	6	4	11
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal		1	5	1	7
3	Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal		1	5		6
4	Bidang Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik		2	8		10
5	Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik		1	2	2	5
TOTAL			6	26	7	39

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 7 orang, sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan Diploma sebanyak 4 orang, tingkat pendidikan S1 sebanyak 18 orang, dan tingkat pendidikan S2 sebanyak 10 orang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, secara umum tingkat pendidikan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah mumpuni karena sebanyak 72 persen pegawai yang memiliki tingkat pendidikan akademik S1 dan S2 atau dengan kata lain hanya 28 persen pegawai DPMPTSP yang belum memiliki (1) kemampuan mengingat informasi secara umum dan luas, dalam domain Kognitif, (2) kemampuan menerjemahkan dan mengubah informasi ke dalam berbagai bentuk media (angka, kalimat, gambar), (3) kemampuan mengaplikasikan suatu informasi, konsep, teori atau metode memecahkan masalah, (4) kemampuan analisis untuk menjabarkan struktur persoalan sehingga mudah dipahami, (5) kemampuan sintesis

dalam berfikir, dan (6) kemampuan melakukan penilaian berdasarkan suatu kriteria yang baku dengan metode ilmiah (Benjamin S. Bloom, 1956).

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SD	SLTP	SMA/SMK	D3	S1	S2/S3	
1	Sekretariat			2		5	4	11
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal			1	2	3	1	7
3	Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal			1	1	3	1	6
4	Bidang Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik			2	1	5	2	10
5	Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik			1		2	2	5
TOTAL				7	4	18	10	39

2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang, jumlah jabatan struktural yang tersedia berjumlah 17 jabatan struktural dan yang telah terisi adalah sebanyak 17 jabatan struktural, sehingga pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 17 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.4. Sedangkan sisanya pelaksana (staf) adalah 22. Namun kebutuhan jabatan fungsional belum dipetakan sehingga Dinas Penanaman Modal dan PTSP belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Data pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP menurut jabatan dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	11

4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	-
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	22
	Subag Umum, Aset dan Kepegawaian	
	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	1
	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	1
	Pengelola Kepegawaian	-
	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	-
	Pengelola Surat	-
	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1
	Pengemudi	-
	Subag Keuangan	
	Bendahara	1
	Penyusun Laporan Keuangan	-
	Pengelola Keuangan	-
	Pengelola Akuntansi	-
	Pengelola Gaji	-
	Verifikator Data laporan Keuangan	-
	Pengadministrasi Keuangan	1
	Subag Program	
	Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan	1
	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	-
	Pengelola Program dan Kegiatan	-
	Seksi Perencanaan Penanaman Modal	
	Analisis Investasi dan Permodalan Usaha	1
	Pengelola Bahan Perencanaan	1
	Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
	Analisis Pengembangan Potensi daerah	-
	Pengelola Data Pengembangan Investasi	1
	Pengadministrasi Umum	1
	Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik	
	Analisis Hasil Pengawasan Dan Pengaduan Masyarakat	-
	Pengawas Penanaman Modal	-

	Pengadministrasi Umum	1
	Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik	
	Analisis Sistem Informasi	1
	Pengelola Teknologi Informasi	-
	Seksi Penatausahaan Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik	
	Analisis Tata Usaha	-
	Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi	-
	Analisis Dokumen Perizinan	3
	Pengelola SIM Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	1
	Pengemudi	1
	Seksi Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik	
	Analisis Pengaduan Masyarakat	2
	Pengelola Pengaduan Publik	-
	Seksi Promosi Penanaman Modal	
	Analisis Pengembangan Pasar	1
	Pengelola Pemetaan Sumber Daya Investasi	1
	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	-
	Seksi Fasilitas Kemitraan Penanaman Modal	
	Pengelola Kerjasama Penanaman Modal	-
	Analisis Iklim Usaha dan Kerjasama	-
	Pengadministrasi Umum	1
	TOTAL	39

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang didominasi laki-laki sebanyak 23 orang, sedangkan perempuan sebanyak 16 orang, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.



Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Sekretariat	4	7	11
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	4	3	7
3	Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal	3	3	6
4	Bidang Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik	3	7	10
5	Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik	2	3	5
TOTAL		16	23	39

2.2.6. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka 44 persen menduduki jabatan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang-

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III	1	4	5
3	Eselon IV	4	7	11
TOTAL		5	12	17

2.2.7 Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang tersebut, juga terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki. Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/ modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Dinas Penanaman Modal dan

PTSP dirasakan belum mencukupi dan memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum aset khususnya aset tetap berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik . Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP s/d TA. 2021

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1.	Kendaraan roda 4	7	6	1	
2.	Kendaraan roda 2	10	7	3	
3.	Peralatan kantor : - Komputer PC - Laptop - Meja 1 Biro - Meja ½ Biro - Kursi Kerja - Kursi Tamu - Lemari Arsip	292	185	107	

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Periode 2013-2018

Gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) . Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada sub bab berikut.

Dilihat dari jumlah investor di Kabupaten Sumedang, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun asing jumlahnya hampir sama. Namun dilihat dari total investor yang berinvestasi terdapat peningkatan yang drastis sejak tahun 2013 dengan jumlah investor yang hanya mencapai 13 naik tajam di tahun 2017 dengan jumlah investor mencapai 106. Dilihat dari total nilai yang dikeluarkan investor terlihat adanya pergeseran dari PMA ke PMDN. Pada tahun 2013 jumlah PMA jauh lebih besar dibandingkan PMDN. Namun sejak tahun 2014 jumlah PMDN jauh lebih besar dibandingkan dengan PMA. Pada tahun 2016 tercatat perbandingan PMDN dengan PMA mencapai 9.996 : 18.

Hal ini juga berlaku pada tenaga kerja yang terserap. Sejak tahun 2014, tenaga kerja yang terserap melalui PMDN jauh melebihi tenaga kerja yang terserap oleh PMA. Pada tahun 2014 terlihat ketimpangan serapan tenaga kerja dari PMDN dibandingkan dengan tenaga kerja dari PMA mencapai 17.142 : 70. Sementara serapan tenaga kerja dari PMDN dan PMA pada tahun 2016 mencapai 44 : 6.

Tabel 2.8
Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Sumedang

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
a.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	13	24	33	56	106	113
	Jumlah PMDN	5	13	15	26	49	89
	Jumlah PMA	8	11	18	30	57	24
b.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	723.374.880.000	1.343.691.183.872	1.564.607.334.819	4.642.207.668.416	9.966.078.815.581	11.120.239.558.000
	PMDN (Rp)	9.415.000.000	695.911.081.348	1.564.607.334.819	4.642.207.668.416	9.966.078.815.581	10.056.002.015.131
	PMA (Rp)	713.959.880.000	647.780.102.524	28.333.300	26.133.063	18.138.200	1.064.237.543.489
c.	Rasio daya serap tenaga kerja	15.620	17.212	24.934	33.697	51.415	8.740
	PMDN	2,299	17.142	22.030	30.293	44.561	5.428
	PMA	13,321	70	2.904	3.404	6.854	3.312
	Jumlah Perizinan yang dikeluarkan	5,404	4.406	5,088	6,224	4.790	
d	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	-98.44	7291.51	124.82	196.70	114.68	

Sumber : Dinas Penanaman Modal Kabupaten Sumedang

2.4. Tantangan dan Peluang Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluang yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam menciptakan berbagai Kebijakan



dan pelayanan di Bidang Penanaman Modal yang dapat menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan penyelenggaraan tupoksinya antara lain adalah :

2.4.1. Tantangan

1. Pemahaman masyarakat belum merata dalam penggunaan system aplikasi
Masih banyaknya masyarakat kesulitan dalam penggunaan system aplikasi untuk mengajukan permohonan perijinan usaha
2. Cakupan jaringan internet di Sumedang belum 100%
Cakupan jarak antara menara telekomunikasi sudah terlayani untuk seluruh kabupaten Sumedang. Namun demikian karena alasan kondisi geografis terdapat 4 desa yang tersebar di 2 kecamatan yang tidak ada signal internet, terdapat 33 desa pada 12 kecamatan dengan signal internet buruk.
3. Adanya oknum petugas illegal dalam proses pelayanan perijinan
Pengajuan pelayanan perijinan oleh masyarakat masih menggunakan jasa oknum tertentu sehingga menambah biaya bagi pemohon. Untuk itu, perlu diberikan peningkatan pemahaman masyarakat agar pemohon bisa secara langsung melakukan mengajukan permohonan ijin usaha


2.4.2. Peluang

1. Peraturan Perundangan terkait penguatan kapasitas Kelembagaan Bidang Penanaman Modal dan PTSP.
 - Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan : Pasal 350 ayat (1) Kepala Daerah Wajib Menyelenggarakan Pelayanan Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Pasal (2) Daerah membentuk unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menyatakan : Pasal 100 ayat (1) Gubernur dan bupati/walikota yang tidak memberikan pelayanan pemenuhan Komitmen Ijin Usaha dan/atau Izin Komersil atau Operasional sesuai OSS kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah ini adalah peraturan perraturan perundang-undangan terkait dikenai sanksi.
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, memuat beberapa ketentuan yaitu : Daerah wajib membentuk kelembagaan PTSP, melimpahkan seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan kepada PTSP, izin ditandatangani oleh kepala DPMPTSP, pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara elektronik, jangka waktu penerbitan ijin usaha paling lama 7 hari kerja.
- Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, menyatakan : 1). Meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan penyederhanaan dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan penyelesaian perizinan berusaha. 2). Membentuk satgas pada provinsi dan kabupaten/kota, memulai reformasi peraturan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Mengamanatkan bahwa nomenklatur dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
- Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, menyatakan Pasal 4 ayat (1) PTSP daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan melekat pada DPMPTSP provinsi dan kabupaten/kota.



- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang, Menyatakan Pasal 5 ayat (1) dalam rangka penciptaan iklim usaha daerah yang kondusif dalam peningkatan penanaman modal di daerah, pemerintah daerah menyusun prosedur perizinan yang jelas, dengan indikator kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, transparan dan akuntabel yang ditetapkan dalam peraturan bupati.(2) pelayanan perizinan dilaksanakan oleh lembaga yang menangani pelayanan dan perizinan penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu.
 - 2. Dukungan dari pihak swasta dan stakeholders pendukung
Pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan PTSP dapat membentuk forum komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait, forum komunikasi diperlukan dengan fungsi : menyelesaikan permasalahan penanaman modal dan PTSP, melakukan evaluasi penyelenggaraan penanaman modal dan PTSP, dan memberikan rekomendasi kepada kepala daerah.
 - 3. Terdapat teknologi yang dapat mendukung kinerja dinas
Dalam penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan PTSP, daerah menggunakan Pelayanan Secara Elektronik (PSE). PSE bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan dan akuntabel.
 - 4. Koordinasi dengan instansi teknis
Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, PTSP bertanggungjawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah teknis.
 - 5. Adanya OSS untuk mempermudah pelayanan PTSP
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau
- 

bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui system elektronik yang terintegrasi.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Perumusan isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang sebagai OPD, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan PTSP kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal dalam yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang periode 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang

Sebagaimana dijelaskan pada bagian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2014-2018 dapat diketahui bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang masih perlu dijaga agar tetap memperoleh kinerja yang optimal. Adapun penyebab dari permasalahan utama yang menjadi dasar perbaikan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah sebagai berikut :



Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Aspek	Permasalahan
1	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kualitas RUPM 2. Dokumen daerah yang mendukung pelayanan penanaman modal (RTRW) belum tersedia 3. Belum optimalnya integrasi dokumen RUPM antara provinsi dan pusat 4. Belum adanya insentif untuk investor 5. Masih sedikitnya kajian strategis untuk meningkatkan peluang investasi
2	Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya promosi dan fasilitasi 2. Dokumen daerah yang mendukung promosi dan fasilitasi kemitraan penanaman modal (RTRW & RDTR) belum tersedia 3. Masih lemahnya tingkat kemitraan dalam menarik investor penanam modal
3	Bidang Pelayanan Perijinan dan Mal Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pelayanan perijinan 2. Belum efektifnya peran dari tim teknis; 3. Lambatnya rekomendasi dari dinas teknis;
4	Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh oknum illegal dalam proses pelayanan perijinan 2. Lemahnya instrument system pengendalian, Penanganan Pengaduan 3. Belum terintegrasi system data pelayanan perizinan 4. Masih rendahnya ketaatan pengusaha dalam pelaporan kegiatan penanaman modal

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

3.2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*.

Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 bahwa pemerintah Kabupaten Sumedang akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Sumedang sesuai dengan RPJMD

periode 2018-2023 sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023”

Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya.

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi pemerintah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat;
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Kabupaten Sumedang 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP periode 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP periode 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD



Kabupaten Sumedang 2018-2023. Adapun dalam misi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan PTSP mengemban misi nomor 3 (Tiga) Yakni Misi “ **Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal**” dan Nomor 4 (empat) yakni Misi “ **Menata Birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.**”. Untuk mengetahui hambatan dan faktor penentu keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam mewujudkan Misi tersebut, disusun uraian dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023

No.	Misi RPJMD (Misi Kepala Daerah) yang Terkait Peran Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Hambatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam Mewujudkan Misi RPJMD	Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam Mewujudkan Misi RPJMD
1	2	3	4
	Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat kabupaten sumedang	Belum optimalnya pelayanan dan penyediaan informasi dalam penanaman modal dan pelayanan terpadu	Perbaiki pelayanan dan promosi informasi dalam penanaman modal dan pelayanan terpadu

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Terkait di Provinsi Jawa Barat

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan Misi tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi antara Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan capaian Renstra Dinas Provinsi Jawa Barat yang terkait dan Renstra K/L yang secara vertikal sesuai dengan kewenangannya di Tingkat Pusat sehingga dapat terwujud kesesuaian capaian tersebut secara berjenjang dari Kabupaten Sumedang ke Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya secara vertikal bisa tercapai.

Kesesuaian antara capaian Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan Kementerian



terkait dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Saat ini Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target provinsi dan Kementerian terkait. Target tersebut akan terus ditingkatkan untuk periode 2018-2023 sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan Bidang Penanaman Modal . Adapun keterkaitan atau perbandingan capaian sasaran Renstra Kabupaten Sumedang dengan Renstra Provinsi Jawa Barat dan Kementerian/Lembaga terkait sebagaimana Tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3

Perbandingan Sasaran Renstra Kementerian Terkait serta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Sumedang

INDIKATOR	Sasaran pada Renstra BKPM	Sasaran pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Sumedang	Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat
Penerimaan penanaman modal	Meningkatnya jumlah penanaman modal	Meningkatnya jumlah penanaman modal	Meningkatnya jumlah penanaman modal

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

Kaitan antara Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dengan Rencana Penataan Ruang wilayah adalah terkait pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah adalah ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah Kabupaten Sumedang.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 Pasal 49 (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi;
- b. Ketentuan Perizinan;



- c. ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif;
- d. arahan pengenaan sanksi;
- e. penegakan peraturan daerah; dan
- f. ketentuan penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang.

Ketentuan tersebut terkait dengan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dalam upaya pengembangan iklim penanaman modal pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang menetapkan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Ketentuan mengenai insentif dan disinsentif penanaman modal dalam Peraturan daerah tersebut tertuang dalam Pasal 71 menyatakan bahwa : “Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangannya dengan tetap menghormati hak masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 72 ayat (1) menyatakan : Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah terdiri atas :

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian dana stimulan, belanja pemerintah, subsidi bunga;
- d. pemberian bantuan modal;
- e. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau unsur pemerintah;
- f. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- g. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
- h. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- i. penyediaan dan/atau fasilitasi bantuan teknis; dan/atau
- j. percepatan tatalaksana pemberian perizinan dan non perizinan.”



Ayat (2) menyatakan : Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah terdiri atas:

- a. pengenaan pajak atau retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan
- b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.

Insentif dan Disinsentif tersebut diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan badan hukum atau perusahaan swasta, serta unsur pemerintah di daerah.

Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang, sehingga target-target kinerja yang tertuang dalam Renstra sejalan dengan RTRW dan merupakan bentuk upaya pengendalian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2014-2018, pelaksanaan peran dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP telah diupayakan secara optimal, namun sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya masih menyisakan permasalahan yang perlu diperbaiki pada periode 2018-2023. Selanjutnya untuk mengetahui isu-isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan dua aspek yakni :

- 1) Kebutuhan RTRW dan RDTR Kabupaten Sumedang terkait dengan rencana
- 

- pengembangan kawasan industri baru dan kawasan ekonomi khusus
- 2) Reformasi pelayanan perizinan terkait dengan Kesiapan Implementasi Terbitnya Pp 24 Tahun 2018 Terkait Online Single Submission (OSS) dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Secara Elektronik Yang Pasti, Cepat Dan Mudah

Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4 Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
1	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> Masih rendahnya kualitas RUPM Dokumen daerah yang mendukung pelayanan penanaman modal (RTRW) belum tersedia Belum optimalnya integrasi dokumen RUPM antara provinsi dan pusat Belum adanya insentif untuk investor Masih sedikitnya kajian strategis untuk meningkatkan peluang investasi 	1. Masih rendahnya kualitas pelayan Penanaman Modal
2	Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> Belum optimalnya promosi dan fasilitasi Dokumen daerah yang mendukung promosi dan fasilitasi kemitraan penanaman modal (RTRW & RDTR) belum tersedia Masih lemahnya tingkat kemitraan dalam menarik investor penanam modal 	
3	Bidang Pelayanan Perijinan dan Mal Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pelayanan perijinan Belum efektifnya peran dari tim teknis; Lambatnya rekomendasi dari dinas teknis; 	
4	Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> Pengaruh oknum illegal dalam proses pelayanan perijinan Lemahnya instrument system pengendalian, Penanganan Pengaduan Belum terintegrasi system data pelayanan perizinan Masih rendahnya ketaatan pengusaha dalam pelaporan kegiatan penanaman modal 	
5	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> Masih rendahnya nilai Sakip Perangkat Daerah Masih rendahnya tingkat penyerapan anggaran perangkat daerah 	Masih rendahnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah

		<ol style="list-style-type: none">3. Masih rendahnya upaya menciptakan inovasi bagi perangkat daerah4. Belum adanya target pembangunan Zona Integritas / Reformasi Birokrasi	
--	--	---	--

Dari tabel di atas dapat diketahui secara singkat isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan Penanaman Modal dan PTSP sebagai berikut:

Masih rendahnya kualitas Pelayanan Penanaman Modal



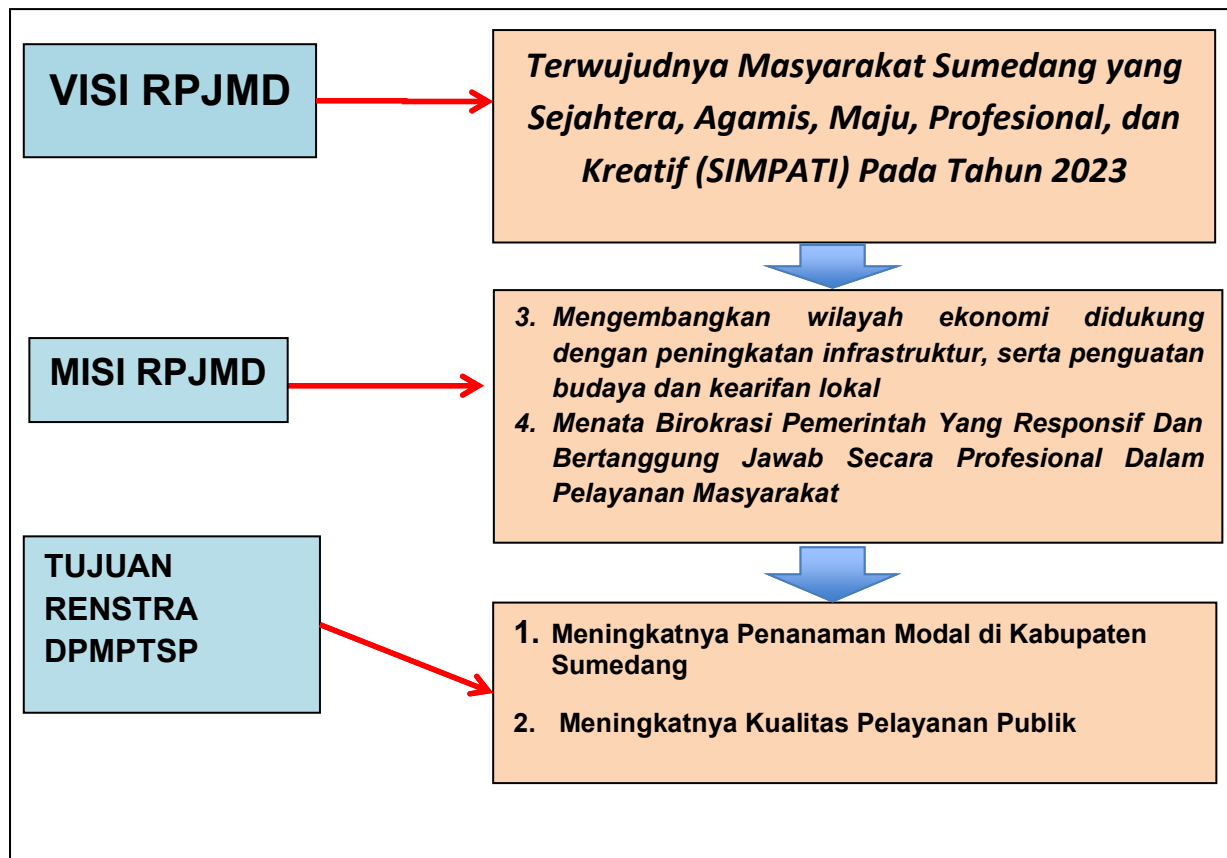
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Tujuan dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah :

“Terciptanya Pelayanan PTSP dan Penanaman Modal yang Responsif dan Berkualitas”

Adapun keterkaitan tujuan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan dalam skema di bawah ini.



TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KETERANGAN	
					2019	2020	2021	2022	2023	FORMULASI	SUMBER DATA
Meningkatnya Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi di Sumedang	1.106.170.000.000,-	1.216.787.000.000,-	1.338.465.700.000,-	1.606.158.840.000,-	1.927.390.608.000,-	2.505.607.790.400,-	Jumlah Nilai Investasi (PMA dan PMDN) di Kabupaten Sumedang	LKPM
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman modal dalam Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,11	84,95	86,25	87,23	88,31	90,00	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan	DPMPTSP

4.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Adapaun Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2019 adalah sebagai berikut :

TABEL 4.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Tujun	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal	TARGET					Kondisi Akhir	Sumber Data
							2019	2020	2021	2022	2023		
1.	Meningkatnya Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi di Sumedang	Jumlah Nilai Investasi (PMA dan PMDN) di Kabupaten Sumedang	Rp	1.106.170.000.000,-	1.216.787.000.000,-	1.338.465.700.000,-	1.606.158.840.000,-	1.927.390.608.000,-	2.505.607.790.400,-	2.505.607.790.400,-	LKPM
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman modal dalam Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan	Poin	84,11	84,95	86,25	87,23	88,31	90,00	90,00	DPMPPT SP

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Dinas Penanaman Modal dan PTSP harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Dinas Penanaman Modal dan PTSP periode 2018-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :



**TABEL 5.1 ANALISA SWOT LINGKUNGAN STRATEGIS
INTERNAL DAN EKSTERNAL**

Internal	Eksternal
<p>Kekuatan (S):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Komiten yang baik dari pimpinan b. Inovasi dan kreativitas dalam pelayanan c. SOTK sudah jelas d. SOP sudah tersedia e. Koordinasi antar bidang baik 	<p>Peluang (O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundangan terkait penguatan kapasitas Kelembagaan Bidang Penanaman Modal dan PTSP 2. Dukungan dari pihak swasta dan stakeholders pendukung 3. Terdapat teknologi yang dapat mendukung kinerja dinas 4. Koordinasi dengan instansi teknis 5. Adanya OSS untuk mempermudah pelayanan PTSP
<p>Kelemahan (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kuantitas dan Kualitas SDM belum memadai (belum sesuai dengan kebutuhan) b. Sarana dan prasarana masih belum memadai c. Kedisiplinan pegawai perlu diperbaiki 	<p>Tantangan (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman masyarakat belum merata dalam penggunaan system aplikasi 2. Cakupan jaringan internet di Sumedang belum 100% 3. Pengaruh oknum petugas illegal dalam proses pelayanan

5.1.1 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya :

1. Mempercepat peningkatan penanaman modal di sektor/bidang usaha unggulan
2. Meningkatkan akuntabilitas prosedur pelayanan perizinan

5.1.2 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang adalah :

1. Mengembangkan potensi dan peluang usaha unggulan
2. Menciptakan sistem insentif bagi kegiatan penanaman modal
3. Melakukan penyempurnaan pelimpahan kewenangan dan penyederhanaan SOP (standar operasional prosedur) pelayanan perizinan



4. Melakukan pengembangan dan integrasi aplikasi system pelayanan perizinan

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

TABEL 5.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI RPJMD : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023			
MISI RPJMD : Ke 3 : “Mengembangkan Wilayah Ekonomi Didukung Dengan Peningkatan Infrastruktur, Serta Penguatan Budaya Dan Kearifan Lokal”			
Misi Ke-4 : Menata Birokrasi Pemerintah Yang Responsif Dan Bertanggung Jawab Secara Profesional Dalam Pelayanan Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	1. Mempercepat peningkatan penanaman modal di sektor/bidang usaha unggulan	Mengembangkan potensi dan peluang usaha unggulan
			Menciptakan sistem insentif bagi kegiatan penanaman modal
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman modal dalam Penyelenggaraan PTSP	2. Meningkatkan akuntabilitas prosedur pelayanan perizinan	Melakukan penyempurnaan pelimpahan kewenangan dan penyederhanaan SOP (standar operasional prosedur) pelayanan perizinan
			Melakukan pengembangan dan integrasi aplikasi system pelayanan perizinan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagai institusi yang melaksanakan pelayanan Penanaman Modal dan PTSP. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini.



Tabel 6.1.a (T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2020
(Sebelum Perubahan)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program (Outcome) dan kegiatan	Satuan	Data Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2019			Tahun 2020				
							Target	Rp	Realisasi	Target	Rp	Realisasi		
Terciptanya Pelayanan PTSP dan Penanaman Modal yang Responsif dan Berkualitas													Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
	Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan	0.00.00 0.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100%	100%	1.716.184.535,00	1,00	100%	1,974,793,086.00	100%	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang



garaan PTSP													
	0.00.00 0.01.00 1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa : Jasa Telpon, Internet, Sumber Daya Air, Listrik, IP publik, Pulsa Modem (Kuota Intenet) Mirroring Server	Jenis	7 Jenis	7 Jenis	242.179.335	7 Jenis	7 Jenis	295,614,550.00	7 Jenis	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
	0.00.00 0.01.00 3	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi : ATK,Jasa operator, cetak, penggandaan, mamin pegawai, mamin rapat, dan mamin tamu dinas.	Jenis	5 Jenis	5 Jenis	693.961.100	5 Jenis	5 Jenis	1,339,254,220.00	5 Jenis	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
	0.00.00 0.01.00 5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jenis	11 Jenis	11 Jenis	39.900.000	11 Jenis	11 Jenis	32,400,000.00	11 Jenis	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
	0.00.00 0.01.00 6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi	OK	87 OK	87 OK	342.520.000	87 OK	96 OK	150,699,316.00	96 OK	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
	0.00.00 0.01.00 7	Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Jumlah Publikasi, dekorasi pameran	Kali	2 Kali	2 Kali	277.627.100	2 Kali	2 Kali	41,700,000.00	2 Kali	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
	0.00.00 0.01.00 8	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan	Orang	10 Orang	10 orang	67.500.000	10 orang	10 orang	60,000,000.00	10 orang	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang

		0.00.00 0.01.01 2	Penyediaan Jasa Kebersihan	Jumlah Petugas Jasa Kebersihan	Orang	5 Orang	5 Orang	52.500.000	5 Orang	5 Orang	55,125,000.00	5 Orang	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		0.00.00 0.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100%	100%	3.040.274.072	100%	100%	1,538,833,480.00	100%	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		0.00.00 0.02.00 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil Jabatan		1 Unit	-	-	-	1 Unit			Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		0.00.00 0.02.00 7	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor	Jenis	5 Jenis	5 Jenis	1.468.120.122	5 Jenis	-	951,674,630.00	-	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		0.00.00 0.02.01 1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Unit Gedun g Kantor	1 Unit Gedung Kantor	1 Unit Gedung Kantor	149.450.000	1 Unit Gedung Kantor	1 Unit Gedung Kantor	346,668,000		Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		0.00.00 0.02.01 3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operas ional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Jenis	18 Jenis	18 Jenis	147.504.200	18 Jenis	18 Jenis	196,490,850.00	18 Jenis	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		0.00.00 0.02.01 5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedu ng Kantor	Jumlah Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara, Perlengkapan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara	Jenis	3 Jenis	3 Jenis	103.650.000	3 Jenis	3 Jenis	44,000,000.00	3 Jenis	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		0.00.00 0.02.01 6	Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang direhab	Unit	1 unit	1 unit	1.171.549.750	1 unit	-	-	-	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		0.00.00 0.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	persentase terpenuhinya sarana disiplin aparatur	Persen	100%	100%	146.250.000	100%	-	-	-	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang

		0.00.00 0.03.00 1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan	Jumlah pakaian dinas	Jenis	4 Jenis	4 Jenis	110.650.000	4 Jenis	-	-	-	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		0.00.00 0.03.00 3	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jenis	3 Jenis	-	35.600.000	-	-	-	-	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		0.00.00 0.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas aparatur	Persen	100%	100%	306.900.900	100%	100%	5,250,000.00	100%	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		0.00.00 0.05.00 2	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	Orang	80 Orang	80 Orang	306.900.900	80 Orang	80 Orang	5,250,000.00	80 Orang	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		0.00.00 0.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dengan standar pelaporan kinerja	Persen	100%	100%	112.415.000	100%	100%	110,935,714.00	100%	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
				Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dengan standar akuntansi pemerintah daerah	Persen	100%	100%	112.415.000	100%	100%	110,935,714.00	100%	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		0.00.00 0.06.00 1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	30.000.000	6 Dokumen	6 Dokumen	64,809,764.00	6 Dokumen	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		0.00.00 0.06.00 2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	82.415.000	12 Dokumen	12 Dokumen	46,125,950.00	12 Dokumen	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang

		0.00.00 0.07	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan Tahunan SKPD terhadap dokumen perencanaan lima	Persen	100%	100%	53.012.700	100%	100%	40,615,870.00	100%	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
				Persentase kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	Persen	100%	100%	53.012.700	100%	100%	40,615,870.00	100%	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		0.00.00 0.07.00 1	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	53.012.700	8 Dokumen	8 Dokumen	40,615,870.00	8 Dokumen	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		0.00.00 0.08	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Persentase Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Persen	100%	100%	25.000.000	100%	100%	26,648,300.00	100%	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		0.00.00 0.08.00 1	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola	Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	25.000.000	8 Dokumen	8 Dokumen	26,648,300.00	8 Dokumen	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		1.02.12 .15	Program Peningkatan Penanaman Modal Daerah	Persentase peningkatan jumlah investor	Persen	100%	100%	497.778.193	100%	30%	642,185,265.00	0%	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		1.02.12 .15.001	Pembuatan Peta Potensi Investasi	Jumlah Dokumen	Dokumen	-	2 Dokumen	216.100.000	2 Dokumen	-	-	-	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang

		1.02.12 .15.002	Perumusan Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	Jumlah Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	-	-	-	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		1.02.12 .15.003	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Jumlah even pameran	Kali	3 Event Pameran	3 Event Pameran	191.678.193	3 Event Pameran	-	-	-	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		1.02.12 .15.004	Penyelenggaraan Kerjasama Penanaman Modal	Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	40.000.000	3 Dokumen	-	-	-	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		1.02.12 .15.005	Penyempurnaan Rencana Umum Penanaman Modal	Jumlah Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		1.02.12 .15.006	Fasilitasi Pemberian insentif penanaman modal	Jumlah Kebijakan	Unit Perusahaan	-	-	-	1 Kebijakan	56,008,140.00	1 Kebijakan	-	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		1.02.12 .15.007	Penyusunan dokumen pemetaan potensi dan peluang Penanaman Modal	Jumlah Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	-	-	1 Dokumen	147,960,150.00	1 Dokumen	-	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		1.02.12 .15.009	Penyusunan studi kelayakan investasi di kab. Sumedang	Jumlah Dokumen	Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	438,216,975.00	-	-	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		1.02.12 .16	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Persentase izin yang terbit tepat waktu	Persen	60%	75%	717.164.000	76%	808,281,650.00	109,36%	-	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang



		1.02.12 .16.001	Pelayanan Administrasi Perizinan	Jumlah izin yang diterbitkan (SK)	jumlah SK Izin	4000 SK Izin	4000 SK Izin	286.910.000	-	-	-	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		1.02.12 .16.002	Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Penanaman Modal dan Perizinan	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	Jumlah perusahaan	56 Perusahaan Melaporkan LKPM	56 Perusahaan Melaporkan LKPM	110.000.000	-	-	-	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		1.02.12 .16.003	Pengelolaan Data dan Pelaporan Penyelenggaraan PTSP	Jumlah Dokumen Laporan	Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	219.300.000	-	-	-	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		1.02.12 .16.004	Peningkatan Pengendalian dan Penanganan Pengaduan PTSP	Jumlah pengaduan yang terselesaikan	Dokumen Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.954.000	-	-	-	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		1.02.12 .16.006	Diseminasi kebijakan penanaman modal dan perizinan	Jumlah kegiatan sosialisasi	Kali	-	-	-	-	-	-	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		1.02.12 .16.007	Peningkatan pelayanan perizinan	Jumlah izin yang diterbitkan (SK)	SK	-	-	-	4.000 SK Izin	236,782,500.00	3.977 SK Izin	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		1.02.12 .16.008	Pemutakhiran data perizinan	jumlah objek wajib izin	orang/perusahaan	-	-	-	250 Obyek Wajib Izin	56,569,125.00	250 Obyek Wajib Izin	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		1.02.12 .16.009	Pembangunan Gedung kantor MPP	Jumlah Gedung	Unit	-	-	-	1 gedung	48,200,000.00	-	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang

		1.02.12 .16.010	Pengadaan sarana dan prasarana penunjang Gedung MPP	Jumlah sarana prasarana	Jenis								Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		1.02.12 .16.011	Pengembangan Sistem Informasi Mal Pelayanan Publik	Jumlah Sistem Informasi	Unit				1 sistem informasi	466,730,025.00	1 sistem informasi		Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		1.02.12 .17	Program Peningkatan Promosi dan Kemitraan Penanaman Modal	Persentase Kerjasama Penanaman Modal yang ditindaklanjuti	Persen		100%		100%	565,296,055.50	100%		Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		1.02.12 .17.001	Penyelenggaraan promosi rencana penanaman modal dan perizinan secara digital	Jumlah media yang digunakan sebagai sarana promosi penanaman modal dan perizinan	Unit	2 Media Promosi			2 Media Promosi	273,308,200.00	2 Media Promosi		Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		1.02.12 .17.002	Penyelenggaraan promosi rencana penanaman modal dan perizinan	Jumlah kegiatan promosi	Kali	3 Event/Kali			1 Event/Kali		1 Event/Kali		Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		1.02.12 .17.003	Penyelenggaraan Kerjasama Penanaman Modal	Jumlah fasilitasi kerjasama penanaman modal	Kali	2 Event/Kali			2 Event/Kali	170,384,205.50	2 Event/Kali		Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		1.02.12 .17.004	Penyusunan Electronics Promotion and Investment System (EPIS)	Jumlah sistem	Unit				1 Sistem	121,603,650.00	1 Sistem		Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		1.02.12 .17.005	Pemeliharaan Electronics Promotion and	Jumlah pemeliharaan	Kali				1 kali Pemeliharaan		1 kali Pemeliharaan		Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang

	Investment System (EPIS)											
1.02.12.18	Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan PTSP	Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP	Persen	50%	-	-	-	60%	172,274,364.30	100%	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
1.02.12.18.002	Pengolahan data dan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan PTSP	Jumlah dokumen laporan	Dokumen	4 Dokumen Laporan	-	-	-	4 Dokumen Laporan	53,823,200.00	4 Dokumen Laporan	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
1.02.12.18.004	Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan PM	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	Unit	50 Perusahaan yang dibina	-	-	-	50 Perusahaan yang dibina	118,451,164.30	44 Perusahaan yang dibina	Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang

Tabel 6.1.b (T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan, sub kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumedang Tahun 2021
(Sesudah Perubahan)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program (Outcome) dan kegiatan	Satuan	Data Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2021			
							Target	Rp		
Terciptanya Pelayanan PTSP dan Penanaman Modal yang Responsif dan Berkualitas									Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
	Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan PTSP	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	9.333.290.727	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD -Persentase	Persen	100	100	97.117.800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang

				Kesesuaian Dokumen perencanaan SKPD dengan Dokumen penganggaran SKPD - Persentase Kesesuaian pelaporan kinerja dengan standar pelaporan kinerja						
		2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Dokumen	5	5	30.433.500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Dokumen	2	2	6.627.900	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Dokumen	2	2	8.709.900	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Dokumen	1	1	4.526.900	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan	Dokumen	1	1	4.550.900	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang



				Penganggaran SKPD						
		2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD	Dokumen	19	19	42.268.700	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar Akutansi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	6.014.766.977	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan penerimaan Gaji dan Tunjangan PNS	Dokumen	12	12	5.954.782.327	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar Akutansi Pemerintah Daerah	Dokumen	12	12	17.983.050	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	Dokumen	12	12	42.001.600	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Persentase Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD - Persentase terpenuhinya sarana disiplin	Persen	100	100	15.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang

				aparatur - Persentase jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas aparatur						
		2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang	80	80	15.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran - Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	481.713.450	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	2	2	221.532.650	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran (Makan Minum)	Jenis	2	2	83.160.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	Jenis	2	2	97.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Eks	11	11	30.032.800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang



		2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi	OH	81	81	49.988.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
					OK	81	81		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	420.270.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan rasan pendukung Gedung kantor	Jenis	2	2	420.270.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Persen	100	100	1.835.362.500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	Bulan	12	12	220.100.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
					Jenis	3	3		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Publikasi Dekorasi dan dokumentasi	Buah Spanduk/Baliho	5	5	41.290.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
					Kali Pameran	1	1		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Petugas Outsourcing MPP, jasa kebersihan MPP, Tenaga Pengamanan MPP, Jasa Operator & jasa kehumasan, Uang Lembur PNS dan Non PNS	Org Outsourcing	13	13	1.573.972.500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
					Org Operator	11	11		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
					Org Lembur	26	26		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang

		2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur	Persen	100	100	469.060.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang Dipelihara	Unit Roda Empat	7	7	151.540.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
					Unit Roda Dua	11	11		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan dan mesin yang dipelihara	Jenis	4	4	95.960.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.02.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan				221.560.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	Persen	40	40	150.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor penerima fasilitas/insentif	Unit	10	10	75.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan	Kebijakan	1	1	75.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang



		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase realisasi potensi investasi				75.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen rencana umum Penanaman Modal	Dokumen	1	1	75.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan minat investasi di Sumedang	Persen	5	5	200.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah minat investasi di Sumedang	permohonan ijin investasi / pernyataan minat investasi	4175	4175	200.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Promosi	Kali	105	105	200.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentasi Permohonan Penanaman Modal yang Terasilitasi	Persen	80	80	200.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Izin Terbit Tepat Waktu (Maksimal 5 hari kerja)	Persen	85	85	200.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem	Jumlah Izin yang diterbitkan	SK	4000	4000	170.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang

			Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik							
		2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Layanan Konsultasi yang ditangani	Layanan	60	60	30.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP	Persen	70	70	446.289.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor yang melaksanakan LKPM	Investor	200	200	446.289.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jml Perusahaan yg dipantau	Perusahaan	200	200	84.710.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jml Perusahaan yg dibina	Perusahaan	165	165	235.712.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jml Perusahaan yg diawasi	Perusahaan	165	165	125.867.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang

		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data PM dan Perizinan yang Valid	Persen	100	100	76.173.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data yang dikelola melalui sistem Informasi	Persen	100	100	76.173.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen	Dokumen	4	4	76.173.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang



Tabel 6.1.c (T-C.27)

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2023

(Sesudah Perubahan)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan					Nilai SAKIP Kabupaten Opini BPK	- Kategori - Opini	A Kategori WTP Opini		A Kategori WTP Opini		A Kategori WTP Opini		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah				Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah SAKIP Perangkat daerah	- poin - Kategor	29,04 poin A Kategor		30,86 poin A Kategori		30,86 poin A Kategori			
		2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundangundangan Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang	- Persen - Persen - Persen - Persen - Persen - Persen - Perse	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	97,000,000 6,589,964,534 726,560,000 334,683,500 135,500,000 1,900,000,000 250,000,000	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	111,550,000 6,600,000,000 850,000,000 450,000,000 155,825,000 2,185,000,000 350,000,000	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang



				tepat waktu dan sesuai peraturan perundangundangan Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai										
		2.18.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	30 Dokumen	160,500,000	30 Dokumen	180,825,000	30 Dokumen	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Dokumen	5	35.000.000	5	42.825.000	5	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Dokumen	2	8.000.000	2	10.000.000	2	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Dokumen	2	10.000.000	2	12.000.000	2	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Dokumen	1	6.000.000	1	8.000.000	1	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Dokumen	1	6.500.000	1	8.000.000	1	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD	Dokumen	19	95.000.000	19	100.000.000	19	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	12 Dokumen	6,622,464,534	12 Dokumen	6,620,000,000	12 Dokumen	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah laporan penerimaan Gaji dan Tunjangan PNS	Dokumen	12	6.517.464.534	12	6.620.000.000	12	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Kabupaten Sumedang

													Terpadu Satu Pintu	
		2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar Akutansi Pemerintah Daerah	Dokumen	12	30.000.000	12	35.000.000	12	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan	Dokumen	12	75.000.000	12	80.000.000	12	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	12 Dokumen	97,000,000	12 Dokumen	111,550,000	12 Dokumen	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Data Kepegawaian yang Dikelola	Dokumen	12	37.000.000	12	39.550.000	12	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang	80	60.000.000	80	72.000.000	80	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	5 Dokumen	726,560,000	5 Dokumen	850,000,000	5 Dokumen	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	2	325.000.000	2	443.440.000	2	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran (Makan Minum)	Jenis	2	106.560.000	2	106.560.000	2	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Barang cetak dan penggandaan	Jenis	2	110.000.000	2	110.000.000	2	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang

		2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Eks	11	35.000.000	11	40.000.000	11	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi	OH	81	150.000.000	81	150.000.000	81	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
						OK	81		81		81		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	5 Dokumen	334,683,500	6 Dokumen	450,000,000	6 Dokumen	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket	-	-	-	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan rasan pendukung Gedung kantor	Jenis	2 jenis	334.683.500	2 jenis	450.000.000	2 jenis	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	12 Dokumen	1,900,000,000	12 Dokumen	2,185,000,000	12 Dokumen	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	Bulan	12	300.000.000	12	357.500.000	12	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
						Jenis	3		3		3		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Publikasi Dekorasi dan dokumentasi	Buah Spanduk/Baliho	5	100.000.000	5	160.000.000	5	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
						Kali Pameran	1		1		1		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Petugas Outsourcing MPP, jasa kebersihan MPP, Tenaga	Org Outsourcing	13	1.500.000.000	13	1.667.500.000	13	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Kabupaten Sumedang

					Pengamanan MPP, Jasa Operator & jasa kehumasan, Uang Lembur PNS dan Non PNS							Terpadu Satu Pintu		
						Org Operator	11		11		11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang	
						Org Lembur	26		26		26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang	
		2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	12 Dokumen	400,000,000	12 Dokumen	400,000,000	12 Dokumen	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang Dipelihara	Unit Roda Empat	7	300.000.000	7	300.000.000	7	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
				Unit Roda Dua		11	11		11		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang		
		2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan dan mesin yang dipelihara	Jenis	4	100.000.000	4	100.000.000	4	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
Meningkatnya Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang					Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Persen	20 Persen		20 Persen		30 Persen			
	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal				Jumlah nilai investasi di Sumedang	Rupiah	1.927.390.608.000		2.505.607.790.400,-		2.505.607.790.400,-			
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	Persen	60 Persen	1,200,026,650	90 Persen	1,236,442,036	90 Persen	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sume dang



		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Investor penerima fasilitas/insentif	Investor	10 Investor	150,000,000	10 Investor	150,000,000	20 Investor	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kegiatan Usaha	10	50.000.000	10	50.000.000	10	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi di Kabupaten Sumedang	Dokumen	5 Dokumen	1,050,026,650	5 Dokumen	1,086,442,036	10 Dokumen	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	5	1,050,026,650	5	1,086,442,036	5	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase peningkatan minat investasi di Sumedang	Persen	4 Persen	400.000.000	4 Persen	400.000.000	4 Persen	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		permohonan ijin investasi / pernyataan minat investasi	Permohonan	4175 Permohonan	400.000.000	4175 Permohonan	400.000.000	4175 Permohonan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Tersusunnya Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	105	350.000.000	105	350.000.000	105	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang

Meningkatnya kualitas pelayanan publik					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,31 Poin		90,00 Poin		90,00 Poin			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman modal dalam Penyelenggaraan PTSP				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,31 Poin		90,00 Poin		90,00 Poin			
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase Permohonan Penanaman Modal yang Terfasilitasi	Persen	87 Persen	598,672,695	90 Persen	632,416,648	90 Persen	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Permohonan Perizinan yang terfasilitasi	Persen	80 Persen	598,672,695	85 Persen	632,416,648	85 Persen	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	4000	448.672.695	4000	482.416.648	4000	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	350	50.000.000	350	50.000.000	350	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	60	50.000.000	60	50.000.000	60	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN		Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP	Persen	70 Persen	450,000,000	70 Persen	450,000,000	70 Persen	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Kabupaten Sumedang

			PENANAMAN MODAL										Terpadu Satu Pintu	
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Investor yang melaksanakan LKPM	Perusahaan	200 Perusahaan	450,000,000	200 Perusahaan	450,000,000	400 Perusahaan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha	150,000,000	200 Kegiatan Usaha	150,000,000	400 Kegiatan Usaha	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	150,000,000	200 Pelaku Usaha	150,000,000	400 Pelaku Usaha	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	165	150,000,000	165	150,000,000	165	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase data PM dan Perizinan yang Valid	Persen	100 Persen	200.000.000	100 Persen	200.000.000	100 Persen	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data yang dikelola melalui sistem Informasi	Persen	100 Persen	200.000.000	100 Persen	200.000.000	100 Persen	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang
		2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	4 Dokumen	200.000.000	4 Dokumen	200.000.000	4 Dokumen	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sumedang

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan Penanaman Modal dan PTSP sesuai pembagian bidang urusan dalam UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pejabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

TABEL 7.1 INDIKATOR BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL DAN PTSP

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah nilai investasi di Sumedang	1.106.170.000.000,-	1.216.787.000.00,-	1.338.465.700.000,-	1.606.158.840.000,-	1.927.390.608.000,-	2.505.607.790.400,-	2.505.607.790.400,-
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,11	84,95	86,25	87,23	88,31	90,00	90,00

Target Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu lima tahun mendatang mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023, sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini :



Tabel 7.2 Target Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

VISI RPJMD	MISI RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
					2019	2020	2021	2022	2023
TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMEDANG YANG SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU, PROFESIONAL, DAN KREATIF (SIMPATI) PADA TAHUN 2023	MISI 3: MENGEMBANGKAN WILAYAH EKONOMI DIDUKUNG DENGAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR, SERTA PENGUATAN BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi di Sumedang	1.216.787.000,00,-	1.338.465.700,00,-	1.606.158.840,00,-	1.927.390.608,00,-	2.505.607.790,40,-
	MISI 4: MENATA BIROKRASI PEMERINTAH YANG RESPONSIF DAN BERTANGGUNG JAWAB SECARA PROFESIONAL DALAM PELAYANAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman modal dalam Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,95	86,25	87,23	88,31	90,00

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi :

- a. Seluruh unit OPD, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renstra dengan sebaik-baiknya, serta *stakeholder* OPD berkewajiban untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra ini;
- b. OPD berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja OPD) setiap tahun;
- c. OPD berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra dengan Renja OPD.

